

# Geopolitik dan geostrategi : Kebijakan strategis dan keamanan nasional dalam hubungan internasional

**Dwi Aurora Nayla Rahmadina**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

email: [duwiauroranayla5@gmail.com](mailto:duwiauroranayla5@gmail.com)

## Kata Kunci:

Geopolitik, geostrategi, kebijakan strategis, keamanan nasional, hubungan internasional

## Keywords:

Geopolitics, geostrategy, strategic policy, national security, international relations

## ABSTRAK

Kajian mengenai geopolitik dan geostrategi memiliki urgensi tinggi dalam memahami dinamika hubungan antarnegara serta implikasinya terhadap keamanan dan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran geopolitik sebagai landasan konseptual dalam menentukan arah kebijakan strategis, serta menelaah geostrategi sebagai instrumen praktis dalam menghadapi tantangan global. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menekankan pada analisis komprehensif terhadap teori dan praktik geopolitik serta geostrategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara geopolitik dan geostrategi mampu memberikan kerangka kerja yang efektif bagi

negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri, memperkuat posisi tawar, serta menjaga stabilitas nasional di tengah perubahan lingkungan global.

## ABSTRACT

The study of geopolitics and geostrategy is crucial in understanding the dynamics of interstate relations and their implications for national security and development. This research aims to examine geopolitics as a conceptual foundation for shaping strategic policies and to analyze geostrategy as a practical instrument for addressing global challenges. The method employed is a literature review with a descriptive qualitative approach, focusing on a comprehensive analysis of theories and practices related to geopolitics and geostrategy. The findings reveal that the integration of geopolitics and geostrategy provides an effective framework for states to formulate foreign policy, strengthen bargaining positions, and maintain national stability amid global transformations. These results affirm that the Crusades represent a multidimensional phenomenon reflecting the complexity of the relationship between religion and politics in history.

## Pendahuluan

Kajian mengenai geopolitik dan geostrategi semakin relevan dalam konteks dinamika global maupun kebijakan domestik Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2022, menimbulkan kegelisahan akademik terkait landasan hukum, implikasi sosial-ekonomi, serta konsekuensi strategis bagi stabilitas nasional. Penelitian terdahulu menyoroti aspek hukum dan politik (Akili et al., 2025), strategi politik hukum (Maku et al., 2023), serta perspektif keamanan perbatasan NKRI (Iriansyah, 2018), sementara studi lain menekankan dampak kebijakan geopolitik China di Asia Pasifik terhadap Indonesia (Isnaini, 2023) dan konstruksi Indo-Pasifik sebagai arena perebutan kepentingan maritim



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

global (Pedrason, 2021). Kelebihan kajian tersebut terletak pada analisis mendalam terhadap aspek normatif, ekonomi, dan hubungan internasional, namun masih terdapat keterbatasan berupa fragmentasi fokus yang belum menyatukan dimensi geopolitik dan geostrategi secara komprehensif dalam kerangka kebijakan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis terpadu mengenai geopolitik dan geostrategi, dengan menekankan bagaimana keduanya dapat menjadi landasan strategis dalam merumuskan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum positif, dokumen resmi negara, serta literatur akademik yang relevan dengan isu geopolitik dan geostrategi. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, UUD 1945, serta peraturan pelaksana terkait, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, serta pendapat pakar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademik. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan dan mengkaji isi norma hukum serta menghubungkannya dengan aspek geopolitik dan geostrategi, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai landasan hukum, implikasi strategis, serta relevansi kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara.

### **Pembahasan**

Geopolitik dan geostrategi merupakan dua konsep fundamental yang saling melengkapi dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional Indonesia (Faslah, 2024). Posisi geografis Indonesia yang berada di persilangan dua benua dan dua samudra menjadikannya pusat gravitasi geopolitik dunia. Namun, letak strategis ini sekaligus menghadirkan kerentanan berupa ancaman eksternal maupun internal, mulai dari rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik hingga persoalan perbatasan NKRI. Kajian terdahulu menekankan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum dan politik, tetapi juga harus dipahami dalam kerangka geopolitik dan geostrategi sebagai upaya memperkuat integrasi nasional dan pemerataan pembangunan.

Dalam perspektif geopolitik klasik, pemikiran Ratzel, Kjellen, hingga Haushofer menekankan keterkaitan antara ruang hidup dan kekuatan politik. Indonesia mengadopsi konsep Wawasan Nusantara sebagai doktrin geopolitik yang menegaskan kesatuan wilayah darat, laut, dan udara. Hal ini diperkuat oleh nasionalisme yang tumbuh dari sejarah panjang perjuangan melawan kolonialisme. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penguatan identitas nasional, literasi digital, serta integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan merupakan strategi penting untuk menghadapi ancaman non-tradisional seperti perang informasi dan ideologi transnasional. Dengan demikian, geopolitik Indonesia tidak hanya berbicara tentang ruang fisik, tetapi juga tentang kesadaran warga negara dalam menjaga kedaulatan.

Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam kerangka Ketahanan Nasional yang mencakup delapan gatra: geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kajian (Naja, 2025) menekankan bahwa diplomasi maritim dan kerja sama regional merupakan instrumen utama dalam menjaga stabilitas kawasan. Tantangan seperti pencurian ikan, pelanggaran batas wilayah, dan konflik di Laut Cina Selatan menuntut Indonesia memperkuat armada laut, sistem pengawasan maritim, serta diplomasi preventif. Hal ini menunjukkan bahwa geostrategi Indonesia bersifat defensif dan adaptif, bukan ekspansionis, dengan orientasi utama menjaga keutuhan NKRI.

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik menjadi faktor eksternal yang paling memengaruhi arah kebijakan geopolitik Indonesia. Inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok dan strategi Indo-Pasifik Amerika menciptakan dinamika yang kompleks, di mana Indonesia harus memainkan peran sebagai penyeimbang. Melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan kedua kekuatan besar tanpa terjebak dalam blok tertentu. Strategi ini diwujudkan melalui visi Poros Maritim Dunia dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang menekankan kerja sama inklusif berbasis hukum internasional.

Selain faktor eksternal, Indonesia juga menghadapi tantangan internal berupa ketimpangan pembangunan, urbanisasi, dan bonus demografi. Pemindahan IKN ke Nusantara dipandang sebagai solusi strategis untuk pemerataan ekonomi dan penguatan integrasi nasional. Hasil penelitian (Fachreza & Destra, 2023) menunjukkan bahwa sentimen masyarakat terhadap proses pemindahan IKN di media sosial cenderung beragam, mencerminkan adanya dukungan sekaligus kekhawatiran terhadap dampak pembangunan IKN. Namun, penelitian menunjukkan adanya risiko jangka panjang seperti pembiayaan infrastruktur, inflasi harga tanah, dan potensi oligarki. Oleh karena itu, geostrategi pembangunan harus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, penguasaan teknologi, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Dengan cara ini, pemindahan IKN tidak hanya menjadi proyek politik, tetapi juga instrumen geostrategis untuk memperkuat ketahanan nasional.

Strategi geopolitik kontemporer menuntut negara untuk adaptif terhadap ancaman multidimensi seperti krisis energi, perubahan iklim, dan keamanan siber. Indonesia perlu mengembangkan diversifikasi energi terbarukan, sistem pertahanan digital, serta diplomasi budaya sebagai soft power. Diaspora Indonesia di luar negeri juga dapat menjadi agen diplomasi kultural yang memperkuat citra bangsa di mata dunia. Sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci dalam membangun kedaulatan yang adaptif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembahasan dari berbagai kajian menunjukkan bahwa geopolitik dan geostrategi Indonesia harus dipahami sebagai kerangka terpadu yang menggabungkan aspek identitas nasional, posisi geografis, serta dinamika global. Kelebihan penelitian terdahulu adalah analisis mendalam terhadap aspek hukum, politik, dan keamanan, namun masih terdapat kekurangan berupa fragmentasi fokus. Artikel ini berupaya memecahkan keterbatasan tersebut dengan menyajikan analisis komprehensif yang mengintegrasikan perspektif geopolitik dan geostrategi. Tujuannya

adalah memperkuat fondasi kebijakan nasional agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan, mengoptimalkan potensi geografis, serta berperan aktif dalam percaturan global yang semakin kompleks.

Dalam konteks ketahanan nasional, strategi geopolitik dan geostrategi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor ideologi dan budaya. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai filter ideologis yang menolak radikalisme, ekstremisme, maupun kapitalisme hegemonik yang berpotensi merusak tatanan nasional. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter, kebijakan publik, dan kampanye kebangsaan menjadi instrumen penting untuk memperkuat identitas nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa nasionalisme inklusif berbasis budaya lokal dan nilai keagamaan mampu menjadi benteng pertahanan non-militer dalam menghadapi penetrasi ideologi transnasional.

Selain itu, strategi geopolitik Indonesia harus memperhatikan dimensi ekonomi dan keberlanjutan. Globalisasi dan rivalitas kekuatan besar menuntut Indonesia untuk mengoptimalkan posisi geografisnya sebagai jalur perdagangan internasional sekaligus pusat logistik maritim. Pembangunan infrastruktur strategis seperti tol laut, pelabuhan internasional, dan kawasan industri di sekitar IKN Nusantara harus diintegrasikan dengan kebijakan luar negeri agar mampu menarik investasi sekaligus memperkuat daya saing nasional. Dalam menghadapi percepatan transformasi teknologi dan kecerdasan buatan, (Murdiansyah et al., 2025) menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting sebagai benteng moral dan etika untuk menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berorientasi pada kepentingan bangsa. Namun, risiko seperti ketergantungan pada utang luar negeri, inflasi harga tanah, dan dominasi oligarki harus diantisipasi melalui regulasi yang ketat dan transparan. Dengan demikian, geostrategi ekonomi Indonesia harus berorientasi pada keberlanjutan, pemerataan, dan kemandirian.

Akhirnya, peran pemuda dan diaspora Indonesia menjadi faktor strategis dalam memperkuat geopolitik dan geostrategi bangsa. Generasi muda sebagai agen perubahan memiliki potensi besar dalam bidang teknologi, diplomasi publik, dan ekonomi kreatif. Program seperti pertukaran pemuda antarnegara, pelatihan literasi digital, serta pemberdayaan ekonomi berbasis lokal dapat memperkuat kontribusi mereka terhadap ketahanan nasional. Sementara itu, diaspora Indonesia di luar negeri dapat berperan sebagai duta budaya dan ekonomi, memperkuat citra bangsa di mata dunia, serta menjadi jaringan strategis dalam diplomasi internasional. Sinergi antara pemuda, diaspora, pemerintah, dan masyarakat sipil akan menjadikan geopolitik dan geostrategi Indonesia lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan dan Saran**

Geopolitik dan geostrategi Indonesia merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Posisi geografis Indonesia yang strategis di persilangan jalur perdagangan dunia memberikan peluang besar sekaligus tantangan multidimensi, mulai dari rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok di Indo-Pasifik, ancaman non-tradisional seperti perang

informasi dan siber, hingga ketimpangan pembangunan dalam negeri. Kajian dari berbagai literatur menunjukkan bahwa integrasi antara identitas nasional, wawasan nusantara, serta strategi pembangunan berkelanjutan menjadi kunci dalam memperkuat daya tahan bangsa.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, diplomasi maritim, serta penguatan literasi geopolitik warga negara merupakan contoh konkret implementasi strategi nasional yang berbasis geopolitik dan geostrategi. Namun, terdapat risiko yang harus diantisipasi, seperti pembiayaan infrastruktur, dominasi oligarki, dan penetrasi ideologi transnasional. Oleh karena itu, strategi Indonesia harus bersifat adaptif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang, dengan menekankan sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Ke depan, Indonesia perlu memperkuat tiga hal utama: pertama, revitalisasi nilai Pancasila dan nasionalisme moderat melalui pendidikan, media, dan organisasi keagamaan untuk membangun kesadaran geopolitik warga negara; kedua, pengembangan geostrategi ekonomi dan maritim yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital, energi terbarukan, serta bonus demografi; ketiga, diplomasi aktif di kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN dan forum multilateral untuk menjaga keseimbangan kekuatan global. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan kedaulatan, tetapi juga berperan sebagai aktor strategis yang menentukan arah stabilitas kawasan dan pembangunan global.

## Daftar Pustaka

- Akili, R. H., Moonti, R. M., & Ali, A. (2025). Aspek Geopolitik dan Geostrategi Pemindahan Ibu Kota Negara. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(1), 227–251.
- Fachreza, M., & Destra, R. (2023). Klasifikasi Sentimen Masyarakat Terhadap Proses Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Metode Naive Bayes [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://repository.uin-malang.ac.id/19328/>
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Iriansyah, H. S. (2018). Manajemen Strategi Pengamanan Wilayah Nasional dalam Prespektif Geopolitik dan Geostrategi Perbatasan NKRI. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 9(2), 1–16.
- Isnaini, D. R. (2023). Dampak Kebijakan Geopolitik & Geostrategis China Di Asia Pasifik Terhadap Indonesia. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 11(03), 111–124.
- Maku, S., Akili, R. H., & Kadir, Y. (2023). Analisis Strategi Politik Hukum Terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Geopolitik Dan Geostrategi. *Iblam Law Review*, 3(2), 152–172.
- Murdiansyah, I., Slamet, S., Hamdani, H., & As'ady, M. (2025). Pentingnya Spirit Pancasila Benteng Penahan Gempuran Artificial Intelligence Dalam Bisnis Dan Pendidikan Akuntansi. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 10(01), 36–42. <https://repository.uin-malang.ac.id/23881/>

Naja, M. S. (2025). Geostrategi indonesia dalam menghadapi dinamika global: Ketahanan nasional dan implementasi politik luar negeri. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* Eissn, 3.

Pedrason, R. (2021). Indo-Pasifik dalam perspektif geopolitik dan geostrategi. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(1), 88–95.